



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG KUSWANDI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR III BIDANG PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**
3. NHK : **106465**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

8.150.650.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/200 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/400 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/600 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/550 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/350 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/175 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 650.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/400 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/175 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

535.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, PAJERO SUV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.



260.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	634.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.319.650.000
III. HUTANG	Rp.	153.316.686
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.166.333.314

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.